

## **ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

**Ruliaty<sup>1</sup>, Ismail Badollahi<sup>2</sup>, A Indah Nurfadillah<sup>3</sup>**

Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
(Ruliaty@unismuh.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The results of the study show that: First, the independence of the Bone District Government in meeting the funding needs for the implementation of government tasks, development, and social services to the community is still very low and even experiences ups and downs from year to year, namely from 4.19% in 2014 became 4.33% in 2015 and 3.01% in 2016. Where there was an increase in regional independence which subsequently decreased in 2015. Secondly, the Performance of the Regional Government of Bone Regency in realizing the original regional income was classified as ineffective and classified as efficient, namely in 2014 had an effectiveness ratio of 62.19% and an efficiency ratio of 2.13% then in 2015 had an effectiveness ratio of 59.53% and an efficient ratio of 2.71%, and in 2016 had an effectiveness ratio of 32.96% efficient ratio of 2.16%. Third, Most of which are owned by the Regional Government of Bone Regency are still prioritized to meet the needs of the bell operation rather than capital expenditure.*

**Keywords:** PAD, Budget Realization of Bone Regency Government

### **ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19 % pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2015. Kedua, Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%. Ketiga, Sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal.

**Kata kunci :** PAD, Realisasi Anggaran pemda kabupaten Bone

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran yang semestinya.

Tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan Sesuai dengan anggaran (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Hasil akhir laporan realisasi anggaran ini kemudian akan dipindahkan neraca kelompok ekuitas dana lancar. Setiap laporan realisasi anggaran harus di susun sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).LRA dan SAP di nyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran.PSAP ini berisikan prinsip-prinsip mengenai LRA.Tujuan standar LRA menetapkan dasar- dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otoda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap Pemdanya. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemda melalui program otoda.

Tujuan program otoda adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Analisis deskripsi kuantitatif Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2013-2016. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemda Kabupaten Bone dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut Rasio kemandirian, Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, Rasio pertumbuhan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

**Berikut penjelasan teks Anggaran dan realisasi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone.**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Tabel 4.1.Laporan realisasi & anggaran pemerintah daerah kabupaten bone 2014.**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2014 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2014 (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan asli daerah</b>	149.205.060.55 9,00	155.451.591.186,5 0	104,18
<b>Pendapatan transfer</b>	1.350.094.226.6 84,00	1.352.154.495.205, 46	100,15
<b>Transfer pemerintah pusat-Dana perimbangan</b>	1.074.136.614.3 09,00	1.083.624.984.390, 00	100,88
<b>Transfer pemerintah pusat lainnya</b>	217.767.982.00 0,00	217.767.982.000,0 0	100,00
<b>Transfer pemerintah provinsi</b>	58.189.630.375, 00	50.761.528.815,46	87,23
<b>Lain-lain pendapatan yang sah</b>	33.732.472.760, 00	27.066.070.714,00	80,23
<b>Total pendapatan transfer</b>	1.533.031.760.0 03,00	1.534.672.157.105, 96	100,10
<b>Belanja operasi</b>	1.287.849.910.5 55,00	1.214.855.389.312, 60	94,33
<b>Belanja Modal</b>	246.147.376.75 4,00	209.579.370.996,0 0	85,14
<b>Belanja tak terduga</b>	500.000.000,00	241.750.000,00	48,35
<b>Jumlah belanja</b>	1.534.497.287.3 09,00	1.424.434.760.308, 60	92,82
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>	1.754.472.000,0 0	1.754.472.000,00	100,00
<b>Total belanja dan transfer</b>	1.621.565.104.1 68,00	1.490.810.671.726, 44	91,93
<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	(88.533.344.165	48.861.485.379,52	(49,54)

	,00)		
<b>Jumlah penerimaan pembiayaan</b>	94.159.190.064,00	94.494.512.563,79	100,35
<b>Jumlah pengeluaran pembiayaan</b>	5.625.845.899,00	5.467.529.694,00	97,18
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	88.533.344.165,00	89.026.982.869,79	100,55

Sumber: DPPKAD ( Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan,dan Aset Daerah).

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp. 149.205.060.559,00 dapat di realisasi sebesar Rp.155.451.591.186,50 atau 104,18% Pembiayaan netto yang direncanakan Rp.88.533.344.165,00 dapat di realisasi sebesar Rp.89.026.982.869,79 atau 100,55%,lebih dari anggaran sebesar Rp.1.350.094.226.684,00 sedangkan pembiayaan pengeluaran direncanakan sebesar Rp.5.625.845.899,00 dapat direalisasi sebesar Rp.5.467.529.694,00 atau 97,18%,kurang dari anggaran sebesar Rp.241.750.000,00.

**Tabel 4.2.Laporan realisasi & anggaran pemerintah daerah kabupaten bone 2015:**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2015</b>	<b>REALISASI 2015</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan asli daerah</b>	156.421.92.399,00	159.866.219.583,62	102,20
<b>Pendapatan transfer</b>	1.260.075.685.600,00	1.242.614.366.711,00	98,61
<b>Pendapatan transfer lainnya</b>	388.189.433.000,00	385.474.033.000,00	99,30
<b>Transfer pemerintah provinsi</b>	67.138.405.753,00	53.871.562.151,28	80,23
<b>Total pendapatan transfer</b>	1.715.403.524.353,00	1.681.959.961.862,28	98,05
<b>Belanja operasi</b>	1.467.868.555,00	1.324.096.728.39	90,20

		,71	
<b>Belanja Modal</b>	336.574.748.097,0 0	304.197.875.790, 00	90,38
<b>Belanja tak terduga</b>	500.000.000,00	241.750.000,00	48,35
<b>Jumlah belanja</b>	1.804.943.402.652 ,00	1.628.536.353.92 9,00	90,22
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>		1.754.472.000,00	
<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	(121.788.714.690, 00)	28.457.894.500,4 9	(23,36)
<b>Jumlah pengeluaran pembiayaan</b>	5.753.757.595,00	5.595.941.390,00	97,25
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	121.788.714.690,0 0	131.079.327.941, 77	107,62

Sumber: DPPKAD ( Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan,dan Aset Daerah).

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp.156.421.92.399,00dapat di realisasi sebesar Rp. 159.866.219.583,6 atau 102,2% Pembiayaan netto yang direncanakan Rp. 121.788.714.690,00 dapat di realisasi sebesar Rp. 131.079.327.941,77 atau 107,62%,lebih dari anggaran sebesar Rp. 28.457.894.500,49sedangkan pembiayaan pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 5.753.757.595,00dapat direalisasi sebesar Rp. 5.595.941.390,00atau 97,25%,kurang dari anggaran sebesar Rp.241.750.000,

**Tabel 4.3.Laporan realisasi & anggaran pemerintah daerah kabupaten bone 2016:**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2016 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2016 (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan asli daerah</b>	177.333.582.07 0,00	180.156.598.903, 17	101,59
<b>Pendapatan</b>	1.565.186.413.7	1.540.620.696.55	98,43

<b>transfer dana perimbangan</b>	80,00	4,00	
<b>Pendapatan transfer pusat lainnya</b>	202.773.125.00 0,00	202.773.125.000, 00	100,00
<b>Transfer pemerintah provinsi</b>	104.153.741.09 4,00	107.940.565.438, 00	103,63
<b>Total pendapatan transfer</b>	1.872.113.279.8 74,00	1.851.334.386.99 2,00	98,89
<b>Pendapatan lain-lain yang sah</b>	11.038.190.000, 00	11.038.188.960,0 0	99,99
<b>Jumlah pendapatan</b>	2.060.485.051.9 44,00	2.042.529.174.85 5,17	99,12
<b>Belanja operasi</b>	1.497.137.260.4 10,00	1.396.943.806.32 2,91	93,30
<b>Belanja Modal</b>	367.902.289.36 6,00	330.744.293.124, 00	89,90
<b>Belanja tak terduga</b>	1.000.000.000,0 0	734.156.026,00	73,41
<b>Jumlah belanja</b>	1.866.039.549.7 76,00	1.728.422.255.47 2,91	92,62
<b>Jumlah belanja dan Transfer</b>	2.184.766.158.7 76,00	2.045.111.813.06 8,91	93,60
<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	(124.281.106.8 32,00)	(2.582.638.213,7 4)	2,07
<b>Jumlah penerimaan Pembiayaan</b>	161.537.222.44 2,00	159.956.768.596, 26	99,02
<b>Jumlah pengeluaran pembiayaan</b>	37.256.115.610, 00	36.652.330.420,0 0	98,37
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	124.281.106.83 2,00	123.304.438.176, 26	99,21

Sumber: DPPKAD ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah).

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp. 177.333.582.070,00 dapat di realisasi sebesar Rp.180.156.598.903,17 atau 101,59%. Pembiayaan netto yang direncanakan Rp. 124.281.106.832,00 dapat di realisasi sebesar Rp. 123.304.438.176,26 atau 99,21%, lebih dari anggaran sebesar Rp. (2.582.638.213,74) sedangkan pembiayaan pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 37.256.115.610,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 36.652.330.420,00 atau 98,37, kurang dari anggaran sebesar Rp.241.750.000,00.

pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan bersinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut:

### **Rasio Kemandirian Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern.

#### 1. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{155.451.591.186,50}{1.352.154.495.205,46 + 0} \times 100\% \\ &= 0,114\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian 2014 menunjukkan lebih besar dari rasio kemandirian 2015.

### 2. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{159.866.219.583,62}{1.681.959.961.862,28} \times 100\% \\ &= 0,095\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian 2015 menunjukkan lebih kecil dari rasio kemandirian 2014.

### 3. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{180.156.598.903,17}{1.851.334.386.992,00} \times 100\% \\ &= 0,097\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian 2016 menunjukkan lebih besar dari rasio kemandirian 2015.

### **Rasio Efektifitas dan Efisiensi**

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Bone dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Bone dihitung sebagai berikut:

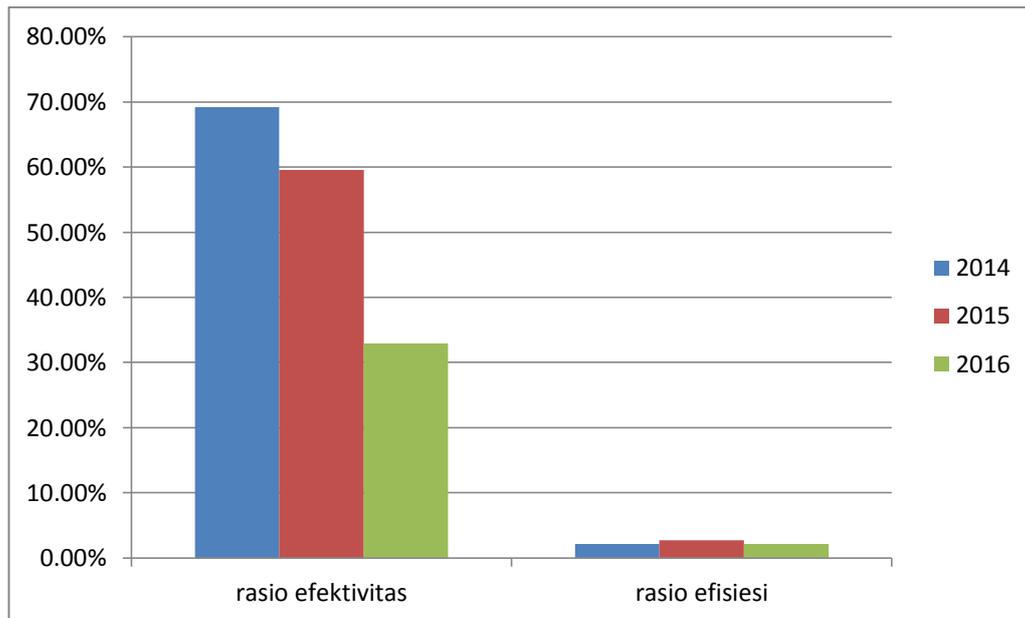
$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

**Tabel 4.4**

Target dan Realisasi Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun  
Anggaran 2014-2016

Keterangan	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Target Penerimaan PAD	32.797.480.272,00	35.974.314.248,00	52.606.038.817,00
Realisasi Penerimaan PAD	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
Biaya Pemungutan PAD	435.297.722,00	580.887.744,00	375.522.395,00
Rasio Efektivitas	62,19 %	59,53%	32,96%
Rasio Efisiensi	2,13 %	2,71 %	2,16 %

Sumber: Data Diolah



**Gambar 3**

### Rasio Efektifitas dan Efisiensi

$$\begin{aligned}
 \text{a) Rasio Efektifitas 2014} &= \frac{20.398.764.209,46}{32.797.480.272,00} \times 100\% \\
 &= 62,19 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efektifitas 2014 relatif lebih besar di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 dan 2016. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efektifitas 2015} &= \frac{21.418.839.483,39}{35.974.314.248,00} \times 100\% \\
 &= 59,53\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efektifitas 2015 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2016 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2016} &= \frac{17.343.783.489,88}{52.606.038.817,00} \times 100\% \\ &= 32,96\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efektivitas 2016 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2014} &= \frac{435.297.722,00}{20.398.764.209,46} \times 100\% \\ &= 2,13\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efisiensi 2014 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2015} &= \frac{580.887.744,00}{21.418.839.483,39} \times 100\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efisiensi 2015 relatif lebih besar di bandingkan dengan rasio efektifitas 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2016} &= \frac{375.522.395,00}{17.343.783.489,88} \times 100\% \\ &= 2,16\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efisiensi 2016 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

### Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

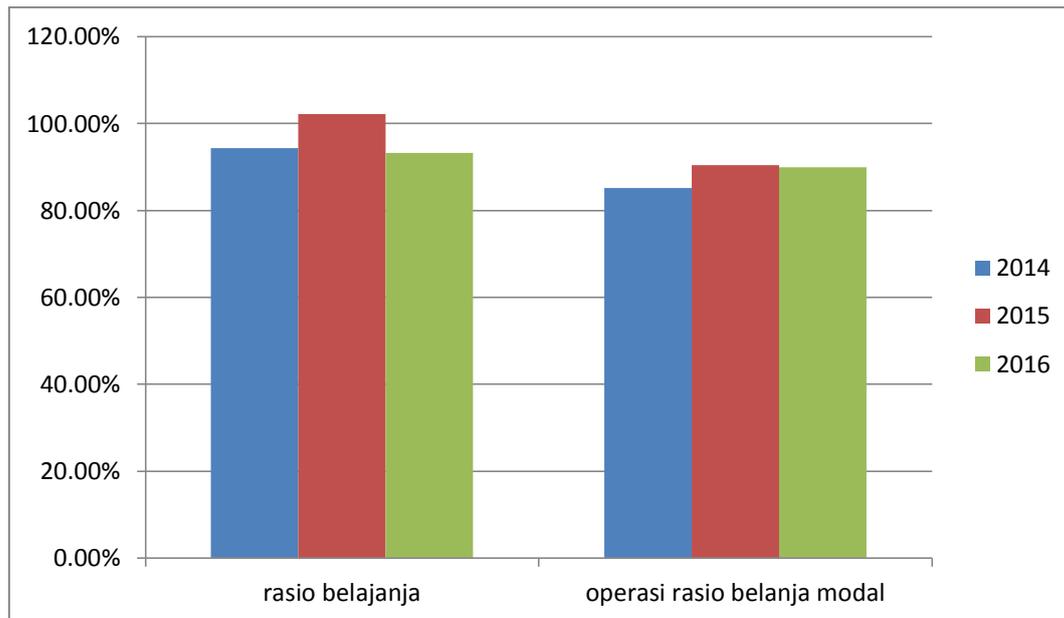
$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

**Tabel 4.5** Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Bone  
 Tahun Anggaran 2014-2016

Keterangan	2014	2015	2016
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.214.855.389.312,60</b>	1.324.096.728.139,71	1.396.943.806.322,91
<b>Belanja Modal</b>	<b>209.579.370.996,00</b>	304.197.875.790,00	330.744.293.124,00
<b>Rasio Belanja Operasi</b>	<b>94,33</b>		
<b>Rasio Belanja Modal</b>	<b>85,14</b>	102,20 90,38	93,30 89,90

Sumber : Data diolah



**Gambar 4**

**Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)**

1. Rasio Aktivitas tahun 2014 :

$$\begin{aligned}
 \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{389.126.144.860,40}{542.037.871.764,40} \times 100\% \\
 &= 71,78 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja operasi 2014 relatif lebih besar di bandingkan belanja modal 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned}
 \text{b. Belanja Modal} &= \frac{152.911.726.904,00}{524.037.871.764,40} \times 100\% \\
 &= 28,21\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja modal 2014 relatif lebih rendah di bandingkan belanja operasi 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

2. Rasio Aktivitas 2015 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 77,51\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja operasi 2015 relatif lebih besar di bandingkan belanja modal 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 22,39\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja modal 2015 relatif lebih rendah di bandingkan belanja operasi 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

3. Rasio Aktivitas 2016 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{496.282.699.295,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 83,17\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja operasi 2014 relatif lebih besar di bandingkan belanja modal 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 16,73\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja modal 2016 relatif lebih rendah di bandingkan belanja operasi 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

**Tabel 4.6** Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 -2016.

No.	Keterangan	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	<b>155.451.591.186,50</b>	159.866.219.583,62	180.156.598.903,17
2.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		102,20	101,59
3.	Pendapatan	<b>1.534.672.157.105,96</b>	1.870.233.204.845,90	2.042.529.174.855,17
4..	Pertumbuhan Pendapatan		98,52	99,12
5.	Belanja Operasi	<b>1.214.855.389.312,60</b>	1.324.096.728.139,71	1.396.943.806.322,91
6.	Pertumbuhan Belanja Operasi		90,20	93,30
7.	Belanja Modal	<b>209.579.370.996,00</b>	304.197.875.790,00	330.744.293.124,00
8.	Pertumbuhan Belanja Modal		90,38	89,90

Sumber: Data diolah

#### 1. Rasio Pertumbuhan 2014 -2016

$$\begin{aligned}
 \text{a. PAD} &= \frac{21.418.839.483,39 - 20.398.764.209,46}{20.398.764.209,46} \\
 &= 5,00 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{b. Pendapatan} &= \frac{526.763.453.464,39 - 519.069.067.698,96}{519.069.067.698,96} \\ &= 1,48 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Rasio Pedapatan dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecilr kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{c. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00 - 389.126.144.860,40}{389.126.144.860,40} \\ &= 7,52 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Rasio operasi dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{d. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00 - 152.911.613.904,00}{152.911.613.904,00} \\ &= -20,96 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Belaja modal dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

## 2. Rasio pertumbuhan 2014 – 2016

$$\begin{aligned} \text{a. PAD} &= \frac{17.343.783.489,88 - 21.418.839.483,39}{21.418.839.483,39} \\ &= -19,02\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan PAD dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecil kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Operasi} &= \frac{496.282.699.295,00 - 418.423.506.141,00}{418.423.506.141,00} \\ &= 18,60\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan belanja operasi dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecil kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{c. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00 - 120.856.244.770,00}{120.856.244.770,00} \\ &= -17,37\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan belanja modal dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecil kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun.

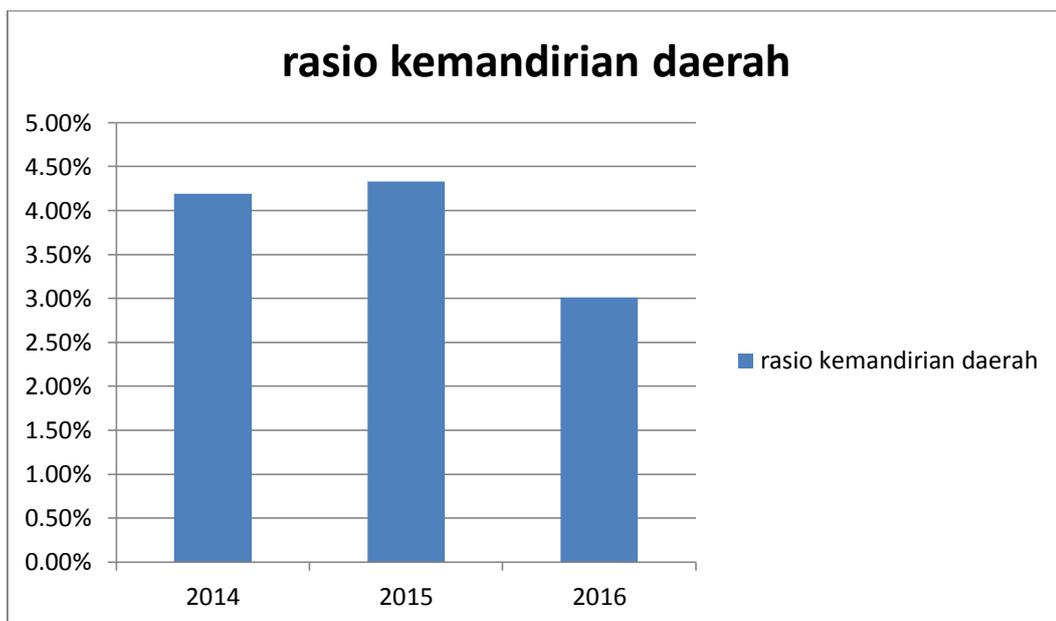
## Evaluasi Kinerja Keuangan Dearah Kabupaten Bone Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 4.7

Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014-2016.

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
<b>Rasio Kemandirian Daerah</b>	4,19%	4,33%	3,01%	Kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah

Sumber: Data diolah



Gambar 5

### Rasio Kemandirian Daerah

Dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2014 sebesar 4,19%, naik pada tahun 2015 sebesar 4,33% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,01%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. Terlihat dari

Pendapatan Asli Daerah yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat dan provinsi), baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah khususnya pada pendapatan lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan di tahun anggaran 2014-2016

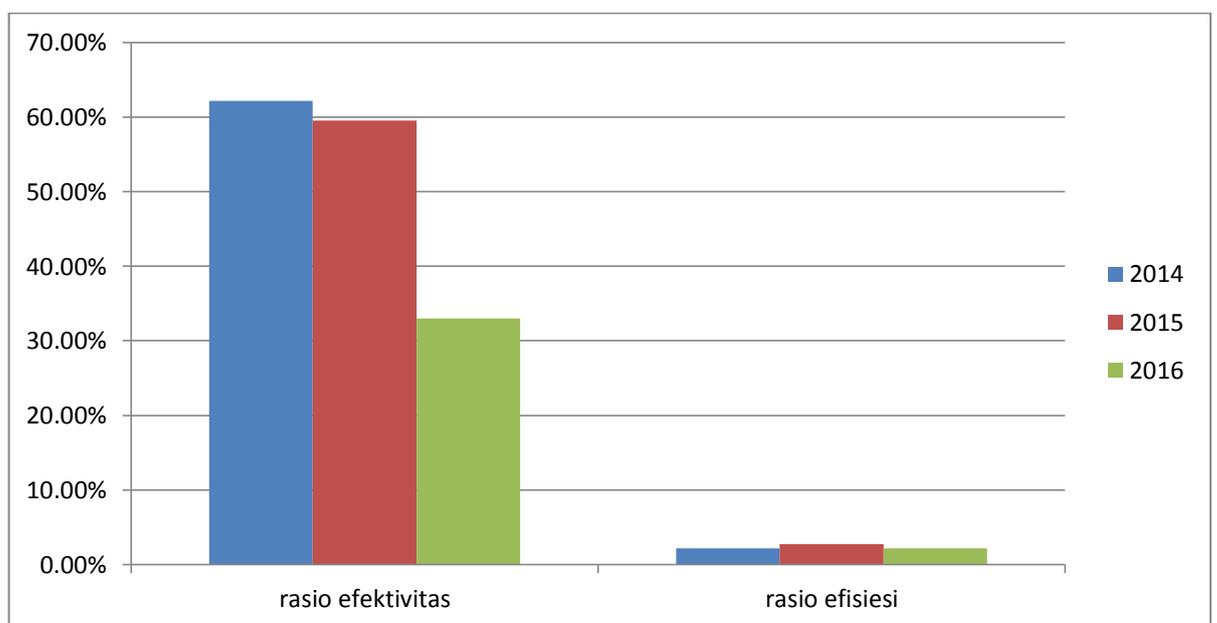
### Rasio Efektifitas dan Efisiensi

**Tabel 4.8**

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014-2016

No.	Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
1.	Rasio Efektifitas	52,19 %	59,53%	32,96%	Pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah pada tahun 2008-2010
2	Rasio Efisiensi	2,13 %	2,71 %	2,16 %	Pemerintah daerah sangat efisien dalam memungut sumber pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensinya menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Sumber: Data diolah



**Gambar 6**

### Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2014 adalah 62,19 %, 2009 59,53 % dan 2010 32,96 % . Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan dari perhitungan rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone dapat dikatakan sangat efisien karena dari perhitungan rasio dari tahun 2014 2,13%, 2013 2,71%, dan 2016 2,16% mengalami kenaikan pada tahun pada tahun 2015 yang berarti adanya penurunan kinerja pada pemerintah, lalu pada tahun 2016 rasio efisiensinya mengalami penurunan yang menggambarkan meningkatnya kinerja pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan.

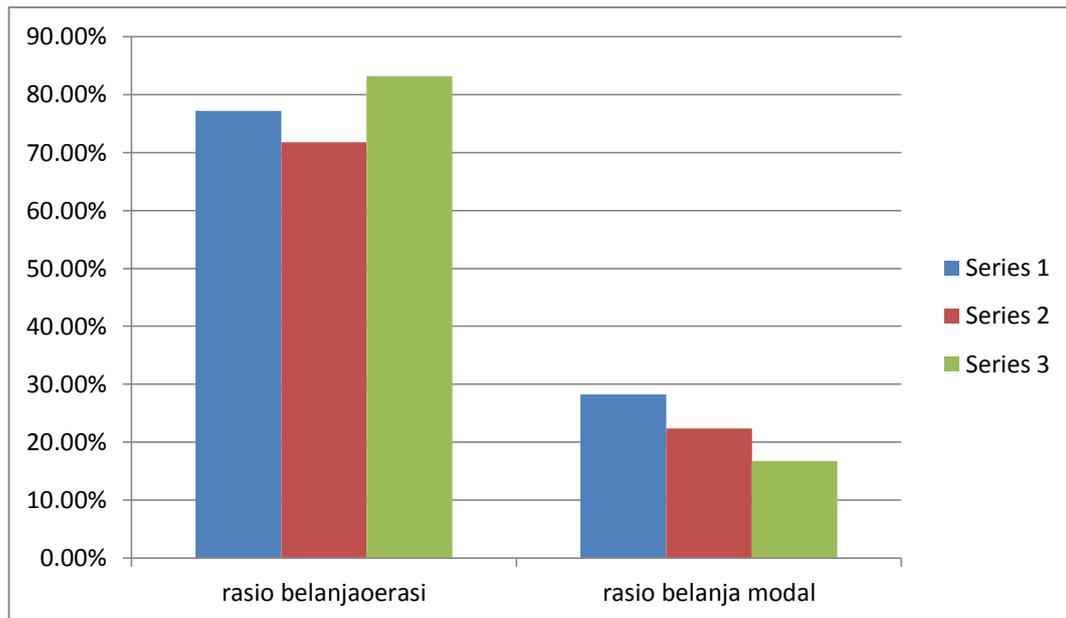
#### **Rasio Aktivitas (Rasio Keseimbangan)**

**Tabel 4.9**

Rasio Aktivitas Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
<b>Rasio Belanja Operasi</b>	77,15 %	71,78 %	83,17 %	Sebagian besar dana APBD diiprioritaskan untuk kebutuhan operasional sehingga belanjaoperasional mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2010
	28,21 %		16,73 %	
<b>Rasio Belanja Modal</b>		22,39 %		Hanya sebagian kecil dana APBD digunakan untuk pembangunan dan itupun rasionya mengalami penurunan dari tahun ke tahun

Sumber : Data diolah



**Gambar 7**

### Rasio Belanja operasi

Dari tabel 4.9 diatas terlihat sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bone karena terlihat rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.

### Rasio Pertumbuhan

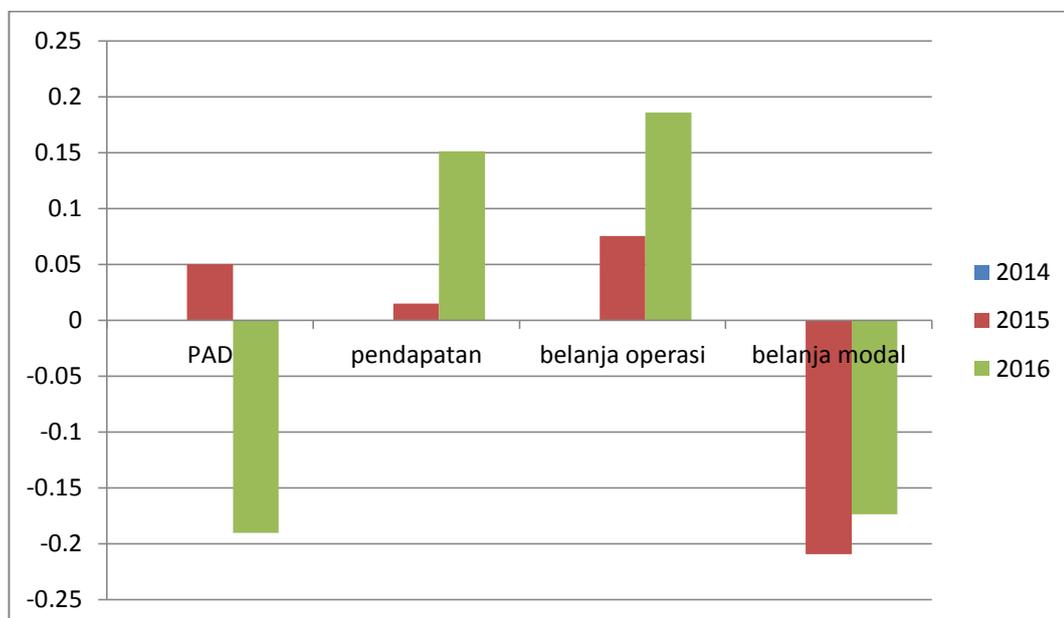
**Tabel 4.10**

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
<b>PAD</b>	-	5,00 %	-19.02 %	Kinerja pemerintahan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama tahun
<b>Pendapatan</b>	-	1,48 %	15,13 %	
<b>Belanja Operasi</b>	-	7,52 %	18,60 %	

<b>Belanja Modal</b>	-	-20,96 %	-17,37 %	2008-2009 hanya pada belanja modal yang pertumbuhannya negatif. Dan tahun 2009-2010 hanya pertumbuhan pendapatan dan belanja operasi yg mengalami pertumbuhan yang negatif.
----------------------	---	----------	----------	---

Sumber : Data diolah



**Gambar 8**

### Rasio Kemadirian Daerah

Dari perhitungan rasio pada tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2014-2015 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Sedangkan pada tahun 2015-2016 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif. Sebaliknya dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang negatif.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19 % pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2015.
2. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintahan serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Efferin, Sujoko Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitriyah Agustin. (2007). "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.Salemba Empat.
- Hendro Sumarjo. (2010). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Sulisyowati Firman dan Andre Purwanugraha, Herbertus. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasulong, Ismail, Edi Jusriadi, And Faidul Adzim. "Dampak Implementasi Model Inkubator Bisnis Dan Partisipasi Lintas Aktor Dalam Pengembangangan Wirausahawan Muda Di Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar." (2018).
- Rahim, A. R., Rasulong, I., Jusriadi, E., & Adzim, F. (2016). Strategi Implementasi Model Pengembangan Wirausahawan Muda Bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten Takalar. *Balance*, 14(02).